

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN TAKESI (TAMAN REKREASI DAN EDUKASI) DI DESA CISONTRON KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Andi Muhamad Rizki<sup>1</sup>, Otong Husni Taufiq<sup>2</sup>, R. Rindu Garvera<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>

e-mail: andimuhamadrizki941286@gmail.com<sup>1</sup>, taufiqhusni65@gmail.com<sup>2</sup>,  
rindugarvera79@gmail.com<sup>3</sup>

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum maksimalnya peran pemerintahan desa dalam pengelolaan Takesi (Taman Rekreasi dan Edukasi) Di Desa Cisontron Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan trigulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di Desa Cisontron Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan Teknik wawancara diperoleh informasi terkait 4 dimensi untuk peran pemerintah desa, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Takesi (Taman Rekreasi dan Edukasi) Di Desa Cisontron Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan para informan terkait kebijakan atau aturan tetap pengelolaan wisata berkelanjutan bahwa peran pemerintah desa cisontron sebagai regulator telah menetapkan aset desa dengan optimal. Namun tuntutan dalam pengembangan takesi menjadi hambatan mengenai belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Sehingga upaya yang dilakukan yaitu dibentuknya kelompok sadar wisata sebagai bentuk upaya peningkatan PAD desa, saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagai landasan untuk meminimalisir adanya hambatan yang dialami seperti kurangnya kesadaran SDM serta kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan akses infrastruktur kesadaran masyarakat terkait pengembangan produk wisata seperti ikut serta dalam mengikuti pelatihan UMKM dan pelaku usaha home industry program dana desa.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa; Pengelolaan Wisata; Aset Desa; Partisipasi Masyarakat

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan adanya pariwisata akan lebih mengenal bangsa, kebudayaan, adat-istiadat dan sekaligus dapat menikmati keindahan alam di negara lain. Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan

kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara).

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain didalam Negara penerima wisatawan. Pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti kerajinan tangan, cendera mata, penginapan, dan transportasi (Diana. P, 2017).

Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia yang selalu tumbuh dan berkembang. Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara dan merupakan salahsatu sektor non migas. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlakukan untuk menunjang industri wisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja (Suryani A.I, 2017).

Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak di berbagai segi antara lain dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak lingkungan, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsungnya salah satunya bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum publik. Dan dampak berkelanjutan tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja dalam bidang pariwisata ataupun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya (Wisata, D, 2018).

Menurut Marysya, P., & Amanah, S. (2018) menyatakan bahwa pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai

semua tujuan pengelolaan wisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Desa Cisonrol merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi dengan topografi berbukit-bukit. Desa Cisonrol berada dalam wilayah Kecamatan Rancah dengan jarak + 45 km dari kota Kabupaten Ciamis dan terletak di Provinsi Jawa Barat. Desa Cisonrol memiliki luas wilayah 1.028.933 Ha, sehingga memiliki banyak tempat wisata yang sudah dikembangkan atau potensi yang bisa dikembangkan, sehingga memiliki keindahan dan begitu menarik untuk dijadikan sebagai tempat wisata.

Sesuai dengan Peraturan Desa Cisonrol Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengembangan desa Wisata dinyatakan bahwa salah satu tempat wisata di Desa Cisonrol yaitu Taman Rekreasi dan Edukasi atau disingkat dengan Takesi. Di tempat tersebut rencananya akan dibangun wahana pariwisata seperti taman, kolam renang serta wahana lainnya. Tujuan pengelolaan pariwisata yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat memacu perkembangan pariwisata di Desa Cisonrol. Pariwisata di Desa Cisonrol sudah menjadi salah satu kegiatan ekonomi daerah, walaupun sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Taman Rekreasi Dan Edukasi (Takesi) memang dinilai masih belum tertata dengan baik, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di atas maka salah satu tugas penting Pemerintah Desa Cisonrol

## **KAJIAN PUSTAKA**

Sebagai salah satu perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, maka terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 367-371.

Dalam menjalankan perannya, Pemerintahan Desa akan dihadapkan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagai mana berikut : keadaan sumber daya alam

(SDA), Kondisi sumber daya manusia (SDM), kemapanan kelembagaan untuk Pembangunan, sarana dan prasarana untuk Pembangunan, Kebijakan pembangunan, Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto dalam Larasati dan Ya'taufiq Kurrahman, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Setya di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Peranan disini merupakan bertindak atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Harahap, dkk, 2007: 854). Menurut penjelasan Alam (2009), konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perumusan masalah deskriptif, hal ini dilakukan dengan alasan supaya mendapatkan data yang holistik dalam mengetahui peran Pemerintah Desa Tlekung dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditetapkan menggunakan purposive sampling, observasi langsung yang dilakukan peneliti ketika penelitian dan sumber data tambahan berupa laporan-laporan serta dokumen yang ada di kantor desa Tlekung dan BUMDes. Teknik triangulasi dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, dan peneliti menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang sudah ada.

Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengenai pengelolaan BUMDes dan penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang pengelolaan wisata yaitu Taman Rekreasi dan Edukasi (Takesi).

2. Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.

Latarbelakang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.

Metode Pada Penelitian ini menggunakan Jenis/Pendekatan Yang berupa Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan Merupakan Studi yang digunakan dalam mengumpulkan Informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti dokumen, buku, artikel. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Nurgiansah, 2021). Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Yakni, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa (Nurgiansah, 2020). Untuk mengetahui peranan pemerintah desa, dapat dilihat dari:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak di bangun di desa. Dalam perencanaan tersebut pemerintah desa dapat melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, Karena, pemerintah dikatakan berhasil dalam merencanakan jika hasil yang dicapai sangat bagus dan selesai dikerjakan.

## 3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari penyelewengan anggaran kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan.

Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengenai pembangunan infrastruktur dan penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang pengelolaan wisata yaitu Taman Rekreasi dan Edukasi (Takesi) yang ada di Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

1. Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).

Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dalam kelompok tani. Tujuan dibentuk kelompok tani untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota dan keluarganya. Kelompok tani sendiri merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyuluhan.

Manfaat itu bisa berupa manfaat sosial ekonomi serta manfaat-manfaat lain yang membawa kemajuan diwilayah pedesaan-pedesaan tersebut yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan dimaksud bukan saja dari segi ekonomi atau pendapatan semata melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat local melalui distribusi peningkatan pendapatan dan penyerahan tenaga kerja lokal desa memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Karena pemerintahan desa secara umum memiliki wewenangan yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa desa

mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, (rekognisi), kewenangan local berskala Desa (*subsidiarity*), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Masyarakat di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, pada umumnya hidup dari bertani dengan potensi kekayaan alam yang menjanjikan. Kegiatan kelompok tani dapat berkembang jika adanya dukungan dari pemerintah yang melihat potensi kelompok tani yang cukup aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membawa kemajuan bagi desanya. Dari asset usaha tani yang dikelola, tentunya dapat memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani maupun bagi masyarakat. Namun pada saat ini kondisi kelompok Tani di Desa Mobuya dari tahun ketahun dapat dikatakan belum mengalami suatu perkembangan seperti sesuatu yang diharapkan atau hanya berjalan ditempat. Rendahnya suatu kinerja kelompok tani antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa yang ada.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2007:15). Dengan terbentuknya Gapoktan dapat dilihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah berjalan tapi belum. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya. Pemerintah hanya menjalankan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Mobuya telah menjalankan tugasnya sebagai regulator walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembuatan aturan dan program yang ada.

Sebagai Dinamisator pemerintah desa memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Namun partisipasi dari anggota kelompok tani sendiri dalam kegiatan kelompok tani seperti penyuluhan dan pelatihan masih sangatlah rendah dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat sedikit, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dan keaktifan dari pemerintah sendiri.

Pemerintah sebagai Fasilitator dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah baik dari penyediaan fasilitas penyuluhan ataupun pelatihan kepada kelompok tani. Pemerintah sebagai katalisator belum terlaksana dengan baik karena pemerintah kurang memperhatikan hal-hal yang mendorong laju perkembangan

seperti sumber daya alam, sumber daya manusia yang unggul, serta kurangnya penyediaan modal. Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan kelompok tani dan penelitian yang sedang peneliti lakukan tentang pengelolaan wisata yaitu Taman Rekreasi dan Edukasi (Takesi) yang ada di Desa Cicontrol berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Desa Cicontrol Kecamatan Rancah. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Beberapa kebijakan pemerintah desa dalam sektor pariwisata diantaranya Pembinaan dan Pengelolaan kepariwisataan seperti: mengencakan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk di Desa Cicontrol, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas terlihat bahwa pengembangan wisata Takesi di Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mendapat tantangan yang kompleks terutama dalam hal pengelolaan yang belum maksimal, hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan, yaitu :

1. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa khusus nya Taman Rekreasi dan Edukasi hanya keinginan dari kepala desa dan sebagian orang bukan dari Musyawarah Pembangunan desa (musrenbang). Hal ini terlihat dari banyaknya Masyarakat yang kurang setuju dengan Pembangunan taman Rekreasi dan Edukasi
2. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan Taman Rekreasi dan Edukasi tidak berjalan dengan signifikan. Hal ini dilihat dari kurangnya manajemen pengelolaan objek Wisata Takesi oleh Pemerintah Desa.
3. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait objek wisata Taman Rekreasi dan Edukasi. Hal ini dilihat dari masih banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui apa itu Taman Rekreasi dan Edukasi. Dan masih minimnya periklanan di sosial media sehingga sebagian masyarakat di kabupaten ciamis dan sekitarnya kurang tahu tentang lokasi Taman Rekreasi dan Edukasi yang berada di desa cicontrol kecamatan rancah.

## **METODE**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode Penelitian deskriptif yaitu suatu Teknik peneliti yang dilakukan dengan cara menggunakan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan teori-teori yang ditemukan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

Menurut Arikunto (2006:23) penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu guna memperoleh informasi mendalam mengenai keadaan yang terjadi saat ini di lapangan atau lokasi tempat penelitian yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan regulasi atau aturan terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada Masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan Langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas Pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada Masyarakat, semua aparat pemerintah desa, baik kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa semua aparat pemerintahan tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang professional dan akuntabel.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan tersebut mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Takesi (Taman Rekreasi dan Edukasi) Di Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dialami dan bagaimana Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dilapangan. Hasil wawancara tersebut akan penulis

uraikan dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi menurut Arif dalam Raintung dkk (2021:6,) yaitu sebagai berikut:

### **1. Peran Pemerintah**

Peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan. Sebagai regulator pemerintah desa membuat aturan dan program-program tentang pemberdayaan kelompok tani, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok tani yang ada. Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan. Pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat desa, serta pengambilan keputusan berbasis digital sangat diperlukan oleh Pemerintah Desa dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang efisien (Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Anwar, A. N. R., Sujai, I., & Firmanto, C., 2024).

### **2. Adanya Kebijakan Aturan Aturan Pengelolaan Wisata**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebijakan atau aturan tetap pengelolaan wisata berkelanjutan bahwa peran Pemerintah Desa Cisonrol sebagai regulator belum menetapkan aset Desa belum optimal. Namun tuntutan dalam pengembangan takesi menjadi hambatan ke infrastruktur jalan, kesadaran Masyarakat yang masih kurang tentang wisata dan Pembangunan di takesi yang belum terealisasi, di karenakan menunggu anggaran selanjutnya. mengenai belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut sehingga upaya yang dilakukan yaitu dibentuknya kelompok sadar wisata sebagai bentuk upaya peningkatan PAD desa, saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagai landasan untuk meminimalisir adanya hambatan yang dialami seperti kurangnya kesadaran SDM serta kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan akses infrastruktur kesadaran masyarakat terkait pengembangan produk wisata seperti ikut serta dalam mengikuti pelatihan UMKM dan pelaku usaha *home industry* program dana desa.

Berdasarkan hasil observasi tentang kebijakan atau aturan tetap pengelolaan wisata takesi yang berkelanjutan belum optimal infrastruktur yang kurang baik, kurangnya juga kesadaran Masyarakat mengenai wisata takesi. Ini menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan takesi karena kurangnya pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan atau aturan tetap pengelolaan wisata takesi yang berkelanjutan belum berjalan dengan optimal, masih banyak permasalahan yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan teori menurut Arif dalam Raintung dkk (2021:6) Peran Pemerintah sebagai Regulator yang menyatakan bahwa peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan. Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan

### **3. Adanya Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pendidikan dan Pelatihan tentang promosi wisata bagi pengelola takesi mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator belum berjalan dengan optimal serta belum sesuai dengan baik dan tertib administrasi. Namun disamping itu hambatan kesadaran peran aktif Masyarakat dalam hal Pendidikan dan informasi yang masih dikatakan rendah dan kurangnya pembentukan kelompok kerja sehingga pemerintah desa perlu terbuka dengan memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat dan tantangan dari pengembang wisata takesi.

Berdasarkan hasil observasi tentang Pendidikan dan pelatihan tentang promosi wisata bagi pengelola takesi masih terlihat kurangnya dana dan sumber daya serta tenaga pengajar yang kompeten dan kurangnya kesadaran dan motivasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendidikan dan pelatihan tentang promosi wisata bagi pengelola takesi masih belum terealisasi dengan baik serta masih adanya permasalahan yang ditemukan seperti SDM sadar wisata atau rasa memiliki masih kurang.

Hal tersebut selaras dengan teori menurut Arif dan Raintung dkk (2021:6) yang mengatakan bahwa Peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan. Sebagai regulator pemerintah desa membuat aturan dan program-program tentang pemberdayaan kelompok tani, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dalam kelompok tani yang ada. Peran pemerintah yang paling terasa salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan.

### **4. Adanya Kesadaran dan Peran Aktif dari Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesadaran dan peran aktif dari Masyarakat tentang pengembangan takesi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah desa cicontrol tentang pengembangan wisata takesi sudah memberikan dukungan yang optimal seperti kebijakan dan regulasi, pelatihan dan pengadaan SDM, kolaborasi dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pemerintah desa berperan dalam memberikan kesadaran dalam memberikan sosialisasi pemeliharaan lingkungan promosi dan penerimaan wisata serta pengembangan infastruktur dalam pengelolaan wisata bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran dan peran aktif dari Masyarakat tentang pengembangan takesi di mana pemerintah sudah memberikan dukungan yang optimal, seperti mengadakan pelatihan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Sehingga selaras dengan penelitian menurut (Al Azis, 2022) yang menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisor yakni menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat petani, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.

### **5. Adanya Sarana dan Prasarana Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator seperti sarana dan prasarana pendukung pengembangan wisata di Takesi bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis wisata yang dimaksud dalam pengembangan wisata takesi melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan bantuan kemasyarakatan akan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat melalui peluang kerja dan bisnis lokal. Mereka juga menangani kepentingan berbagai pihak untuk optimalisasi pengembangan wisata, atraksi berkelanjutan, seperti ekowisata, konservasi, edukasi, budaya, pertanian. Perencanaan jangka panjang yang holistik, keterbatasan dana, dan kurangnya investasi serta keterbatasan finansial, teknologi, infastruktur, sosial, budaya, kesadaran, dukungan, kesulitan pengelolaan, dan operasional. dapat menghambat pengembangan sarana prasarana. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk perencanaan jangka panjang terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan infastruktur pariwisata dan mengadopsi pendekatan inovatif dalam pengelolaan atraksi untuk daya tarik yang berkelanjutan untuk mencapai konsensus dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sarana dan prasarana pendukung dilakukan perencanaan jangka Panjang terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif antara Pemerintah, sector wisata dan masyarakat. Sehingga selaras dengan teori menurut dalam (Fahira dkk, 2022) Pemerintah desa sebagai fasilitator diperlukan sebagai penyedia sarana yang menunjang semua rencana dalam mengembangkan wisata. Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki wewenang untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan pengembangan agar dapat menjabatani kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pengembangan desa.

**KESIMPULAN**

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Takesi (Taman Rekreasi dan Edukasi) di Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan para informan. Dimensi peran pemerintah desa sebagai regulator. Kebijakan atau aturan tetap pengelolaan wisata berkelanjutan bahwa peran pemerintah desa cicontrol sebagai regulator telah menetapkan asset desa dengan optimal. Namun tuntutan dalam pengembangan takesi menjadi hambatan mengenai belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Sehingga, upaya yang dilakukan yaitu dibentuknya kelompok sadar wisata sebagai bentuk upaya peningkatan PAD desa, saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagai landasan untuk meminimalisir adanya hambatan yang dialami seperti kurangnya kesadaran SDM serta kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan akses infrastruktur kesadaran masyarakat terkait pengembangan produk wisata seperti ikut serta dalam mengikuti pelatihan UMKM dan pelaku usaha home industry program dana desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23-31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata Issn*, 1410, 3729.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran pemerintah Desa Purworejo dalam pengembangan wisata alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(3), 291-303. <https://doi.org/10.17977/um063v2i3p291-303>
- Fajri, Z. (2019). Peran Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Sd/Mi. *Jurnal Ika Pgsd (Ikatan Alumni Pgsd) Unars*, 7(2). 110-124.
- Imron, Z. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Studi Desa Pulau Melako Kec. Bathin Viii Kab. Sarolangun). *Skripsi. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*.

- Jannah, M., & Junaidi, J. (2020). Faktor Penghambat Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran Sosiologi Di Sman 2 Batusangkar. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(3), 191-198.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 8(4), 367-371.
- Lewakabessy, S. M. (2021). Taman Rekreasi Dan Edukasi Di Kota Sorong Dengan Pendekatan Eco-Cultural (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Marani, S. M. (2019). Taman Rekreasi Dan Edukasi Pertanian Di Desa Karang Tengah, Imogiri Kabupaten Bantul Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Marysya, P., & Amanah, S. (2018). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Potensi Desa Di Kampung Wisata Situ Gede Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 2(1), 59-70.
- Mulia, G. (2011). Taman Pintar Di Kota Solo Sebagai Fasilitas Rekreasi-Edukasi Seni Dan Budaya Yang Mencitrakan Arsitektur Tradisional Jawa (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Novianty, M. (2017). Taman Edukasi Profesi Dan Rekreasi Anak Di Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Anwar, A. N. R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). Pelatihan Digital Leadership Bagi Perangkat Desa Di Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4(2), 351-360.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Suharto, S. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Prosiding Senaspolhi*. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/9631%0Ahttps://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/9631/4874>

Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.

Suryani, A. I. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, Dan Pendidikan Geografi*, 3(1).

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Wisata, D. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3).

Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).